

**PENGARUH UKURAN DAERAH, TINGKAT KEKAYAAN DAERAH,
TINGKAT KETERGANTUNGAN, BELANJA MODAL,
DAN UKURAN LEGISLATIF TERHADAP KINERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2014-2018**

Skripsi

Untuk memenuhi Sebagai Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana Akuntansi

Pada Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Disusun oleh:

LEONARDA ARCHITA EVELINDASARI

NPM: 16 04 23008

Fakultas Bisnis dan Ekonomika

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

Skripsi

**PENGARUH UKURAN DAERAH, TINGKAT KEKAYAAN DAERAH,
TINGKAT KETERGANTUNGAN , BELANJA MODAL,
DAN UKURAN LEGISLATIF TERHADAP KINERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2014-2018**



Disusun oleh:

LEONARDA ARCHITA EVELINDASARI

NPM: 16 04 23008

Telah dibaca dan disetujui oleh:

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Heni", with a stylized flourish at the end.

Ch. Heni Kurniawan, SE., M.Si.

19 Juli 2020



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Bisnis dan Ekonomika

SURAT KETERANGAN

No. 811/J/I

Berdasarkan dari Ujian Pendadaran yang diselenggarakan pada hari Senin, 5 Oktober 2020 dengan susunan penguji sebagai berikut:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Ch. Heni Kurniawan, SE., M.Si. | Ketua Penguji |
| 2. Dr. Nuritomo, SE., M.Acc. | Anggota |
| 3. Ign. Novianto Hariwibowo, SE., M.Acc. | Anggota |

Tim Penguji Pendadaran Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta telah memutuskan bahwa:

Nama : Leonarda Archita Evelindasari
NPM : 160423008

Dinyatakan

Lulus Dengan Revisi

Pada saat ini skripsi Leonarda Archita Evelindasari telah selesai direvisi dan revisian tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh semua anggota panitia penguji. Surat Keterangan ini dibuat agar dapat digunakan untuk keperluan Yudisium kelulusan Sarjana Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UAJY.

Dekan,

Drs. Budi Suprpto, MBA., Ph.D

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGARUH UKURAN DAERAH, TINGKAT KEKAYAAN DAERAH,
TINGKAT KETERGANTUNGAN, BELANJA MODAL,
DAN UKURAN LEGISLATIF TERHADAP KINERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2014-2018**

benar-benar hasil karya saya sendiri. Pernyataan ide, maupun kutipan baik langsung maupun tidak langsung yang bersumber dari tulisan atau ide orang lain dinyatakan secara tertulis dalam skripsi ini dalam catatan perut dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa saya melakukan plagiarisme sebagian atau seluruhnya dari skripsi ini, maka gelar dan ijazah yang saya peroleh dinyatakan batal dan akan saya kembalikan kepada Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 11 Agustus 2020

Yang menyatakan,

Leonarda Archita Evelindasari

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Ukuran Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan, Belanja Modal, dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2014-2018” berkat dukungan, kerjasama dan bimbingan dari berbagai pihak. Skripsi ini sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S1) di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan yang diberikan dari berbagai pihak. Oleh karena ini, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Ch. Heni Kurniawan, SE., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang berkenan membimbing, memberikan waktu, tenaga, ilmu, ide, nasihat, dan masukan yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi.
2. Seluruh Pejabat DJPK Pusat dan Banten yang telah memberikan izin bagi penulis untuk mendapatkan data dalam skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mengajar dan memberikan pengalaman kepada penulis selama perkuliahan.
4. Papa Evaristus Arif Tomi, Mama Rosalia Dewi Indajani, dan Adek Bartolomeus Nathaniel Mario Evandito yang selalu mendukung, mendoakan, dan menanyakan perkembangan skripsi hingga akhir.

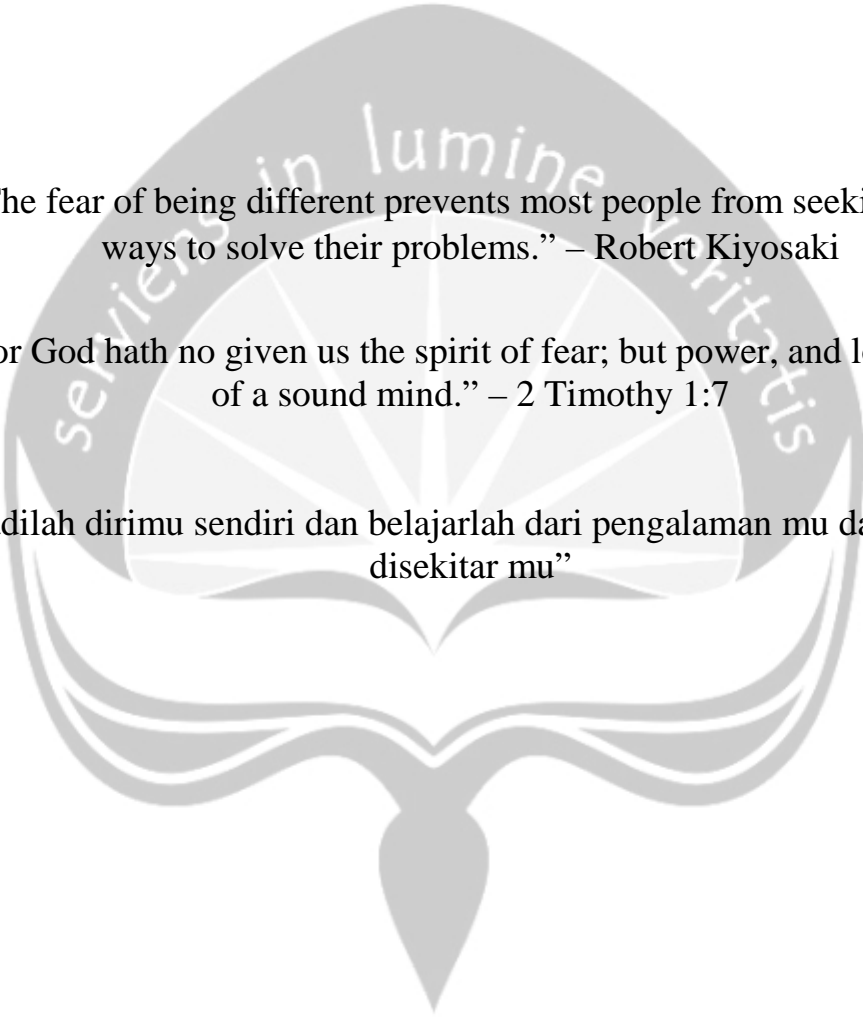
5. Keluarga Pakde Yudi, Bude Retno, dan Titis yang membantu selama proses perantauan di Yogyakarta khususnya pada awal pembelajaran yang setia membantu penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Andreas Fajarputra Pristiono yang telah menemani penulis dari semester 3, memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang selama pembuatan skripsi.
7. Sahabat penulis yang menjadi tempat keluh kesah dan memberikan semangat serta arahan dalam penulisan skripsi maupun persiapan pendadaran yaitu Maria Katharina Wuliarta Febri Ayu Pratiwi.
8. Sahabat tersayang yaitu Devi, Vero, Ce Ivone, Icha, Keke, Ester, Elsa, Anggie, Anin, Kezia, Sisco, Tata, Digna, Meili, Ocep, Rama, Lenny yang sudah memberikan dukungan yang besar dan canda tawa kepada penulis. Terima kasih menjadi pendengar yang baik dan menjadi bagian dari kehidupan penulis.
9. Teman perantauan saya dalam menjalani hidup di Yogyakarta yaitu Errika selaku teman kos sejak semester 5, Rosa, Lintang, dan Yolla.
10. Teman satu bimbingan yaitu Wika, Juan, Veny, Iga, dkk atas segala bantuan dan pengalaman yang pernah diberikan, semangat dari awal hingga akhir penulisan skripsi.
11. Kisik Squad KKN 76 yang memberikan canda tawa dan mewarnai hari penulis dalam penyusunan skripsi serta motivasi untuk cepat selesai bersama.

12. Teman-teman Angkatan 2016 FBE yang sangat kompak dan telah menjadi bagian selama proses perkuliahan. Sukses selalu sobat semua.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dengan caranya masing-masing sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis mengharapkan kritik yang membangun dan saran demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 11 Agustus 2020

Leonarda Archita Evelindasari



“The fear of being different prevents most people from seeking new ways to solve their problems.” – Robert Kiyosaki

“For God hath no given us the spirit of fear; but power, and love, and of a sound mind.” – 2 Timothy 1:7

“Jadilah dirimu sendiri dan belajarliah dari pengalaman mu dan orang disekitar mu”

**PENGARUH UKURAN DAERAH, TINGKAT KEKAYAAN DAERAH,
TINGKAT KETERGANTUNGAN, BELANJA MODAL,
DAN UKURAN LEGISLATIF TERHADAP KINERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2014-2018**

Disusun Oleh:

Leonarda Archita Evelindasari

NPM: 16 04 23008

Pembimbing:

Ch. Heni Kurniawan, SE., M.Si.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menguji kembali pengaruh variabel independen (ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, belanja modal, dan ukuran legislatif) terhadap variabel dependen (kinerja pemerintah daerah) pada kabupaten/kota di provinsi Banten. Permasalahan yang terjadi di Provinsi Banten adalah rendahnya kinerja pemerintah daerah dibidang penyerapan keuangan dan pembangunan fisik yang belum mencapai target.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah arsip sekunder yang diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Banten tahun 2014 – 2018, Laporan Realisasi Anggaran APBD, dan Neraca tahun 2014 – 2018. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 40 data. Metode analisis dengan regresi linear berganda dalam pengujian hipotesis dengan program IBM SPSS 25.

Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, dan belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kata kunci: Ukuran Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan, Belanja Modal, Ukuran Legislatif, Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan Skripsi	iii
Halaman Pernyataan	iii
Kata Pengantar	v
Halaman Motto	viii
Abstrak.....	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
 BAB II : DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	
2.1. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	9
2.1.1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	10
2.1.2. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	11
2.2. Karakteristik Pemerintah Daerah.....	14
2.2.1. Ukuran Daerah	14
2.2.2. Tingkat Kekayaan Daerah.....	15
2.2.3. Tingkat Ketergantungan.....	17
2.2.4. Belanja Modal	17
2.2.5. Ukuran Legislatif	20
2.3. Kerangka Konseptual.....	22
2.3.1. Teori Agensi (Agency Theory)	22
2.3.2. Hubungan Ukuran Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	23
2.3.3. Hubungan Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah..	24
2.3.4. Hubungan Tingkat Ketergantungan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.....	24

2.3.5. Hubungan Belanja Modal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	25
2.3.6. Hubungan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	25
2.4. Penelitian Terdahulu	26
2.5. Pengembangan Hipotesis	30
2.5.1. Pengaruh Ukuran Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.....	30
2.5.2. Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah ...	31
2.5.3. Pengaruh Tingkat Ketergantungan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	32
2.5.4. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.....	33
2.5.5. Pengaruh Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.....	33

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian.....	35
3.2. Objek dan Subyek Penelitian	35
3.3. Populasi Penelitian.....	35
3.4. Sampel Penelitian.....	35
3.5. Variabel Penelitian.....	36
3.6. Operasionalisasi Variabel	37
3.7. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	39
3.7.1. Jenis Data	39
3.7.2. Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.8. Rencana Analisa Data	40
3.8.1. Uji Asumsi Klasik.....	40
3.8.1.1. Uji Normalitas.....	40
3.8.1.2. Uji Multikolinearitas	40
3.8.1.3. Uji Heteroskedastisitas.....	41
3.8.1.4. Uji Autokorelasi.....	41
3.8.2. Analisis Statistik Deskriptif	42
3.9. Uji Hipotesis	42
3.9.1. Hipotesis Statistika.....	42
3.9.2. Tingkat Kesalahan.....	43
3.9.3. Model Pengujian Statistik	44
3.9.4. Teknik Pengujian	45
3.9.4.1. Uji Parsial (t-Test).....	45
3.9.4.2. Uji Nilai F	45

3.9.4.3. Uji Koefisien Determinasi	46
3.10. Rencana Pembahasan.....	46

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Umum Sampel	47
4.2. Statistik Deskriptif.....	47
4.3. Uji Asumsi Klasik.....	50
4.3.1. Uji Normalitas.....	50
4.3.2. Uji Multikolinearitas.....	51
4.3.3. Uji Heteroskedastisitas.....	52
4.3.4. Uji Autokorelasi.....	53
4.4. Pengujian Hipotesis	54
4.4.1. Uji Nilai t	55
4.4.2. Uji Nilai F	56
4.4.3. Koefisien Determinasi.....	57
4.5. Hasil dan Pembahasan	58
4.5.1. Pengaruh Ukuran Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.....	58
4.5.2. Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah ...	59
4.5.3. Pengaruh Tingkat Ketergantungan terhadap Kinerja Pemerintah.....	60
4.5.4. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.....	61
4.5.5. Pengaruh Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.....	62

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	64
5.2. Keterbatasan Penelitian.....	64

Daftar Pustaka	66
Lampiran	66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pemeringkatan Indeks EKPPD	13
Tabel 2.2 Alokasi Kursi DPRD.....	20
Tabel 2.3 Ringkasan Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1 Operasional Variabel	37
Tabel 4.1 Sampel Penelitian	47
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	48
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas	51
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas	52
Tabel 4.5 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	53
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokolerasi	54
Tabel 4.7 Hasil Pengujian Hipotesis	54
Tabel 4.8 Hasil Uji Nilai F.....	56
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Permohonan Informasi DJPK	71
Lampiran II Analisis Data.....	73
Lampiran III Hasil Uji Olah Data	81



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah adalah kewenangan suatu daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan berjalannya otonomi daerah, maka pemerintah daerah bertanggung jawab pada daerahnya dengan memberikan laporan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang diserahkan kepada pemerintah pusat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagai bentuk tercapainya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibutuhkan evaluasi untuk mengukur kinerja pemerintah daerah (UU No.23 Tahun 2014).

Evaluasi pengukuran kinerja tersebut berupa Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah (EKPPD) yang diatur dalam PP Nomor 6 Tahun

2008 dan dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan menggunakan LPPD sebagai sumber informasi utama dalam EKPPD. EKPPD merupakan bahan yang digunakan untuk menilai kinerja setiap Pemerintah Daerah dalam bentuk skor dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK digunakan dalam menilai indeks capaian kerja pada aspek tataran pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan suatu daerah serta menilai indeks komposit manusia. Peringkat hasil EKPPD secara nasional menggunakan *template* analisis indeks dengan hasil akhir berupa “Indeks Hasil Evaluasi LPPD” yang selanjutnya disebut sebagai skor kinerja. Pada pasal 32 Permendagri No.73/2009 kriteria penilaian yang ditetapkan terhadap skor kinerja dibagi menjadi empat tingkatan yaitu Prestasi Sangat Tinggi (ST), Prestasi Tinggi (T), Prestasi Sedang (S), dan Prestasi Rendah.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah adalah ukuran daerah. Ukuran (*size*) perusahaan diukur menggunakan logaritma natural dari total aset, dalam sektor publik ukuran daerah dapat diproksikan dengan logaritma natural dari total aset karena aset menunjukkan sumber daya ekonomi yang dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diperoleh (Murhadi, 2013). Menurut Sumarjo (2010) pelayanan yang baik dapat diberikan pemda jika didukung dengan aset yang baik pula sehingga diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, pemerintah

daerah yang memiliki ukuran besar akan dituntut untuk memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan pemerintah daerah yang kecil ukurannya.

Selanjutnya ada tingkat kekayaan daerah dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dikatakan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting daripada sumber yang berasal dari luar PAD (Julitawati dkk, 2012).

Tingkat ketergantungan menjadi salah satu indikator lain yang dapat mempengaruhi, dilihat dari dana alokasi umum (DAU) yang merupakan bagian dari pendapatan yang berasal dari lingkungan eksternal dan besarnya ketergantungan pemerintah daerah dari transfer pemerintah pusat. Semakin besar DAU yang diberikan maka akan semakin tinggi pula tingkat pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan alokasi. Dengan pemantauan yang tinggi oleh pemerintah pusat maka memotivasi pemerintah daerah untuk memberikan kinerja yang baik (Sumarjo, 2010).

Kinerja pemerintah daerah juga dapat dilihat dari belanja modal. Belanja modal adalah belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (PP No. 71 Tahun 2010). Belanja modal yang besar

merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Sudarsana & Rahardjo, 2013).

Faktor terakhir adalah ukuran legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertugas melakukan peningkatan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga berdampak dengan adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah, yang akhirnya terbentuk titik temu bahwa semakin besar anggota legislatif maka semakin besar pula kinerja pemerintah daerah atau sebaliknya. Tingkat pengawasan yang semakin tinggi akan mendorong tingkat tanggung jawab dan kemauan dalam bekerja (Sumarjo, 2010).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Anggraini dkk, 2019), meneliti Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Kekayaan Daerah dan Ketergantungan Pada Pusat berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah sedangkan variabel Ukuran Pemda, Rasio Belanja Modal, Ukuran Legislatif, dan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Penelitian Juweny (2016), yang dilakukan di Indonesia menunjukkan bahwa Ukuran Daerah dan Tingkat Kekayaan Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemda Provinsi di Indonesia sementara itu Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat, Belanja Daerah, dan Temuan Audit BPK tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemda Provinsi di Indonesia.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Ara dkk (2016) menunjukkan bahwa tingkat Kekayaan Pemda, Ketergantungan Pada Pusat, Belanja Modal, dan Temuan Audit berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemda Pulau Sumba. Penelitian yang sama juga dilakukan Utomo (2015), menunjukkan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah dan Tingkat Kekayaan Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia sedangkan Tingkat Ketergantungan Pada Pusat, Belanja Modal, *Leverage*, dan Temuan Audit BPK berpengaruh negatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Penelitian Saragih dan Setyaningrum (2015) menunjukkan bahwa Latar Belakang Profesi Kepala Daerah dan Ukuran Legislatif berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah sedangkan Latar Belakang Pendidikan, Motif *Reelection*, dan Kompetisi Politik tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Penelitian selanjutnya oleh Sudarsana dan Rahardjo (2013) menunjukkan bahwa Tingkat Kekayaan Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, variabel Temuan Audit BPK berpengaruh negatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, sedangkan Ukuran Daerah, Belanja Modal dan Tingkat Ketergantungan Dengan Pusat tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Penelitian Kusumawardani (2012) menunjukkan bahwa *Size* dan Ukuran Legislatif berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia sedangkan Kemakmuran dan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia.

Melihat hasil penelitian yang berbeda memotivasi untuk dilakukannya penelitian kembali variabel-variabel independen yaitu ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, belanja modal, dan ukuran legislatif terhadap variabel dependen yaitu kinerja pemerintah daerah, dengan obyek yang berbeda yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Peneliti mengambil obyek Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten karena pada tanggal 11 Oktober 2018 dalam website www.kompasiana.com, Kinerja Pemprov Banten dibidang penyerapan keuangan masih sangat rendah dilihat dari hasil realisasi yang berada di bawah target khususnya pada bulan Januari-September 2018 diikuti dengan pembangunan fisik yang masih belum sesuai target pada tahun 2018. DPRD Provinsi Banten menduga rendahnya serapan ini karena kinerja yang lambat dan tidak progresif. Berdasarkan alasan tersebut, maka peneliti mengambil judul **Pengaruh Ukuran Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan, Belanja Modal, dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2014-2018.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan motivasi yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten?
2. Apakah tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten?
3. Apakah tingkat ketergantungan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten?
4. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten?
5. Apakah ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji kembali pengaruh variabel independen (ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, belanja modal, dan ukuran legislatif) terhadap variabel dependen (kinerja pemerintah daerah) serta menggunakan obyek yang berbeda di Provinsi Banten yang sebelumnya belum pernah diteliti pada tahun tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Teori

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi mengenai pengaruh yaitu ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, belanja modal, dan ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah, sehingga penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan pada penelitian sejenis.

2. Kontribusi Praktek

Penelitian ini juga dapat berguna bagi Pemerintah Provinsi Banten untuk menjadi masukan dalam pelaksanaan kinerja pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas layanan publik pada periode berikutnya.

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja pemerintah merupakan suatu hal yang penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik lebih baik. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2009, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Menurut Halim dan Syam (2014) pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi 3 maksud sebagai berikut:

1. Ukuran kinerja sektor publik untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah dimana dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja sehingga dapat meningkatkan efisien dan efektivitas organisasi sektor publik dan memberikan layanan publik.
2. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan akuntabilitas publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.73 Tahun 2009 juga menyebutkan bahwa salah satu evaluasi kinerja yang dilakukan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah berupa evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) yang menggunakan LPPD sebagai sumber informasi utama.

2.1.1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan laporan penyelenggaraan pemerintah selama satu tahun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah. Pasal 9 menegaskan bahwa penyusunan LPPD menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hasil evaluasi LPPD dijadikan dasar dalam melakukan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri melalui Gubernur.

Pemda diharapkan mampu menjelaskan kegiatan penyelenggaraan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Urusan desentralisasi terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup. Sedangkan urusan pilihan merupakan urusan pada suatu daerah yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah seperti kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan. Penyelenggaraan tugas pembantuan untuk kabupaten/kota meliputi tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan kepada desa. Penyelenggaraan tugas umum meliputi kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, dan pembinaan batas wilayah.

2.1.2. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) menyebutkan bahwa salah satu evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah adalah berupa Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). EPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan pada daerah yang baru dibentuk. EKPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 16 menyebutkan bahwa LPPD digunakan sebagai sumber informasi utama dalam melakukan EKPPD.

Sasaran EKPPD meliputi tataran pengambil kebijakan daerah dan pelaksana kebijakan daerah. EKPPD meliputi pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi, penentuan peringkat, dan penentuan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota secara nasional. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pelaksanaan EKPPD oleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh tim nasional, tim teknis, tim daerah, dan sekretariat tim nasional. Pelaksanaan EKPPD oleh tim penilai untuk melakukan pengukuran kinerja pada

tataran pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, pengkajian dan analisis hasil pengukuran kinerja, dan pemeringkatan SKPD. Tim penilai untuk kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua, Kepala Inspektorat Wilayah Provinsi sebagai Sekretaris, Kepala Bappeda Provinsi, Kepala perwakilan BPKP, Kepala BPS Nasional, dan Pejabat lain sebagai anggota. Tim nasional EPPD adalah tim yang membantu Presiden dalam melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional. Tim daerah EPPD adalah tim yang membantu Gubernur dalam melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota di wilayah provinsi.

Metode EKPPD dilakukan dengan menilai total indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Total indeks komposit tersebut merupakan penjumlahan hasil penilaian yang meliputi indeks capaian kinerja dan indeks kesesuaian materi. Indeks Capaian Kinerja (ICK) memiliki bobot sebesar 95% dan Indeks Kesesuaian Materi (IKM) memiliki bobot sebesar 5%. ICK mengukur pengambilan dan pelaksanaan kebijakan sedangkan IKM mengukur urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan, serta kelengkapan laporan. Pengukuran kinerja menggunakan 2 media yaitu template isian individu provinsi, kabupaten dan kota, serta template gabungan antar provinsi, kabupaten, kota dan gabungan nasional. Skor EKPPD dihitung dengan menggunakan rumus:

Skor EKPPD = (%bobot kesesuaian materi x skor kesesuaian materi) + (%bobot capaian kinerja x skor capaian kinerja)

Pada pasal 32 Permendagri No.73/2009 disebutkan bahwa pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota secara nasional, disusun berdasarkan peringkat, skor dan status. Peringkat kinerja pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota diumumkan setiap tanggal 25 April. Pemerintah daerah yang masuk dalam kategori berprestasi sangat tinggi atau terbaik akan diberikan penghargaan kepada Lembaga Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah berdasarkan perturan perundang – undangan. Pemeringkatan Indeks EKPPD terdiri dari 4 kategori prestasi yaitu:

Tabel 2.1

Pemeringkatan Indeks EKPPD

No	Indeks EKPPD	Prestasi
1	$3,00 < \dots \leq 4,00$	Sangat Tinggi
2	$2,00 < \dots \leq 3,00$	Tinggi
3	$1,00 < \dots \leq 2,00$	Sedang
4	$0,00 < \dots \leq 1,00$	Rendah

Sumber: Manual Tata Cara Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, 2016

Hasil dari EKPPD diatur dalam PP Nomor 13 Tahun 2019 yaitu berupa Laporan Hasil Evaluasi Pemeringkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negri. Hasil ini digunakan pemerintah sebagai dasar untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan otonomi atau pembentukan, penghapusan/penggabungan daerah otonom.

2.2. Karakteristik Pemerintah Daerah

2.2.1. Ukuran Daerah

Ukuran daerah menggambarkan seberapa besar daerah tersebut dengan melihat total sumber daya ekonomi yang dimiliki daerah tersebut atau total asetnya. *Size* dapat di ukur dengan jumlah karyawan, total aset, total pendapatan, dan tingkat produktifitas (Damanpour, 1991). Penelitian Sumarjo (2010) yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran (*size*) pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset. PP No. 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan non lancar. Aset lancar merupakan aset yang segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset ini meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset non lancar merupakan aset bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan dalam kegiatan pemerintah maupun masyarakat. Aset ini meliputi investasi jangka panjang (surat utang negara), aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan), dana cadangan, dan aset lainnya.

Pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek atau perusahaan secara umum lainnya, ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan total aktiva, nilai penjualan, dan kapitalisasi pasar karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut (Sudarmadji & Sularto, 2007). Semakin besar aktiva maka

semakin banyak modal yang ditanam, semakin besar penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin banyak dikenal pasar. Ukuran tersebut juga dapat menjelaskan ukuran organisasi di sektor publik. Perusahaan yang memiliki ukuran yang besar akan memiliki tekanan yang besar pula dalam penyajian laporan keuangan yang lengkap begitupula dengan sektor publik dimana Pemerintah Daerah yang memiliki ukuran besar akan dituntut untuk melakukan transparansi dan pengelolaan keuangan daerahnya.

Menurut Murhadi (2013), ukuran (*size*) perusahaan diukur menggunakan total aset yang dimiliki karena nilainya lebih stabil dibandingkan nilai penjualan dan kapitalisasi pasar. Ukuran perusahaan dapat diproksikan dengan bentuk logaritma natural dari total aset dengan tujuan mengurangi fluktuasi data yang berlebih. Dalam sektor publik, maka ukuran pemerintah daerah dapat diukur dengan logaritma natural dari total aset. Menurut Sudarsana dan Rahardjo (2013) log natural digunakan untuk menghindari adanya data yang tidak normal akibat besarnya total aset masing – masing pemda yang berbeda. Ukuran daerah dapat dilihat dari total aset dalam Neraca. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu (PP No. 71 Tahun 2010).

2.2.2. Tingkat Kekayaan Daerah

Kekayaan (*wealth*) pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Sumarjo, 2010). Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang

dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Menurut Mahsun (2013) komponen dari pendapatan asli daerah terbagi menjadi 4 macam, yaitu:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD (Julitawati dkk, 2012).

Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat / daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan (PP No. 71 Tahun 2010). Menurut Halim (2004), rumus perhitungan Tingkat Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Kekayaan Daerah} = \frac{PAD}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$$

2.2.3. Tingkat Ketergantungan

Tingkat ketergantungan berbeda-beda yang diwujudkan dalam bentuk penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU). DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, yaitu jumlah keseluruhan proporsi DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan oleh APBN. Sedangkan proporsi DAU untuk daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota disesuaikan dengan kebutuhan dan kewenangan provinsi dan kabupaten/ kota. Pengalokasian DAU ini terbagi menjadi 2 yaitu pendekatan alokasi dasar seperti jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah dan pendekatan celah fiskal.

Dana Alokasi Umum dapat dilihat di Laporan Realisasi Anggaran bagian Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat. Dana Alokasi Umum merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan peranannya yang sangat strategis dalam menciptakan pemerataan antar daerah. Menurut Halim (2004), rumus Tingkat Ketergantungan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Ketergantungan Pada Pusat} = \frac{DAU}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$$

2.2.4. Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Karakteristik dari Belanja Modal yaitu:

1. Pengeluaran pemerintah yang manfaatnya lebih dari 1 (satu) tahun.
2. Dapat menambah aset (kekayaan) daerah.
3. Implikasi dari pengeluaran ini akan menambah anggaran belanja rutin berupa biaya operasi dan pemeliharaan.
4. Pengeluaran pemerintah yang bersifat investasi.
5. Dalam tahun anggaran tertentu.

Menurut pasal 65 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal dibagi kedalam 6 macam yaitu:

1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja Bangunan dan Gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang

dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada nomor 1 sampai 4, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
6. Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Dapat disimpulkan bahwa belanja modal yang besar akan meningkatkan pelayanan pemerintah yang dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah kepada publik. Belanja Modal dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran bagian Belanja. Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) (2013) menyatakan rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk membiayai belanja modal. Menurut DJPK (2013), rumus perhitungan Belanja Modal sebagai berikut:

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

2.2.5. Ukuran Legislatif

Ukuran Legislatif adalah banyaknya jumlah anggota legislatif yang bertugas mengawasi pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang ada untuk dapat digunakan dengan baik (Wasistiono & Wiyoso, 2009). Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) merupakan lembaga yang memiliki posisi dan peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD.

Menurut SK No. 18 Tahun 2018 menjelaskan bahwa jumlah kursi anggota DPRD ditentukan oleh ketentuan jumlah penduduk. Tata cara perhitungan alokasi kursi dapil, yaitu:

1. Menentukan jumlah kursi untuk tiap kabupaten/kota dengan melihat jumlah penduduk sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Tabel 2.2

Alokasi Kursi DPRD

No.	Jumlah Penduduk	Jumlah Kursi
1	Sampai dengan 100.000	20 kursi
2	100.001 s.d 200.000	25 kursi
3	200.001 s.d 300.000	30 kursi
4	300.001 s.d 400.000	35 kursi
5	400.001 s.d 500.000	40 kursi
6	500.001 s.d 1.000.000	45 kursi

7	1.000.001 s.d 3.000.000	50 kursi
8	Lebih dari 3.000.000	55 kursi

Sumber: Petunjuk teknis penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi

DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum

- Menetapkan angka Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd)

$$\text{BPPd} = \frac{\text{Jumlah Penduduk kab/kota}}{\text{Jumlah Kursi kab/kota}}$$

- Menghitung estimasi Alokasi Kursi per-kecamatan

$$\text{Estimasi Alokasi Kursi Kecamatan} = \frac{\text{Jumlah Penduduk kecamatan}}{\text{BPPd}}$$

- Menata Dapil (Daerah Penilihan Anggota DPRD Kab/Kota) yang terdiri dari kecamatan atau bagian kecamatandengan memperhatikan estimasi jumlah Alokasi Kursi per kecamatan dan prinsip ketentuan penataan Dapil

- Menentukan Alokasi Kursi per Dapil

$$\text{Alokasi Kursi per Dapil} = \frac{\text{Jumlah Penduduk di Dapil}}{\text{BPPd}}$$

- Apabila perhitungan tahap pertama masih terdapat sisa Alokasi Kursi, maka sisa nya dibagikan ke Dapil dengas peringkat penduduk terbanyak
- Mengitung sisa penduduk per Dapil

$$\text{Sisa Penduduk per Dapil} = \text{Penduduk per Dapil} - (\text{Alokasi Kursi tahap 1} \times \text{BPPd})$$

Semakin besar jumlah anggota legislatif maka diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga dapat berdampak dengan adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah dengan pengalokasian anggaran dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan teori keagenan, karakteristik utama hubungan keagenan adalah tanggungjawab dari principal kepada agen. Mengacu pada UU No. 32 tahun 2004, DPRD berperan dalam fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislasi. Tugas *monitoring* yang dilakukan DPRD dianggap setara dengan dewan dalam pemerintahan berdasarkan konsep keagenan (Sutaryo & Jakawinarna, 2013). Ukuran legislatif dalam teori keagenan dapat diproksikan dengan jumlah anggota DPRD yang ada pada suatu Pemerintah daerah sehingga variabel ini diukur dengan menggunakan jumlah total anggota DPRD.

2.3. Kerangka Konseptual

2.3.1. Teori Agensi (Agency Theory)

Dalam teori agensi terdapat dua pihak yang melakukan kontrak atau kesepakatan, yakni pihak yang memberikan kewenangan atau disebut principal dan pihak yang menerima kewenangan atau disebut agent (Halim dan Abdullah, 2010). Adanya pemisahan kepemilikan oleh principal dengan pengendalian oleh agen dalam sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenan. Pada sektor pemerintahan, masalah ini terjadi karna agent (pemerintah) memiliki informasi yang lebih banyak sehingga dapat membuat keputusan atau kebijakan yang dapat mementingkan pemerintah maupun penguasa serta mengabaikan

kepentingan principal (masyarakat) yang menyebabkan *information asymmetry* sehingga memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen.

Mardiasmo (2002) menjelaskan tentang akuntabilitas dalam konteks sektor publik bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (masyarakat). Berdasarkan teori agensi pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah yang itu artinya *information asymmetri* yang terjadi dapat berkurang.

2.3.2. Hubungan Ukuran Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Ukuran daerah menggambarkan seberapa besar daerah tersebut dengan melihat total sumber daya ekonomi yang dimiliki daerah tersebut atau total asetnya. PP No. 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial di masa depan diharapkan

dapat diperoleh. Pelayanan yang baik dapat diberikan Pemda jika didukung dengan aset yang baik pula. Dengan demikian, pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar akan dituntut untuk memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan pemerintah daerah yang kecil ukurannya (Sumarjo, 2010).

2.3.3. Hubungan Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Kekayaan daerah yang dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan (UU No. 33 Tahun 2004). Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Pemda yang memiliki PAD yang tinggi dapat memanfaatkan kekayaan asli daerahnya dalam meningkatkan kemampuan untuk membiayai pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan PAD seharusnya didukung dengan peningkatan kualitas layanan publik yang mencerminkan baiknya kinerja suatu Pemda (Sumarjo, 2010).

2.3.4. Hubungan Tingkat Ketergantungan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Tingkat ketergantungan dinyatakan dengan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Semakin besarnya DAU pada suatu daerah maka akan

semakin tinggi pengawasan pelaksanaan alokasi DAU oleh pemerintah. Dengan pengawasan yang tinggi maka dapat memotivasi Pemda untuk berkinerja lebih baik. Maka semakin tinggi DAU dari Pemerintah Pusat dapat memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat dan membuat kualitas kinerja pemerintah daerah juga semakin meningkat (Utomo, 2015).

2.3.5. Hubungan Belanja Modal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal merupakan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah berupa infrastruktur maupun sarana yang dibangun sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Semakin baik manfaat yang diberikan belanja modal maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakat (Sudarsana & Rahardjo, 2013).

2.3.6. Hubungan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Ukuran Legislatif adalah banyaknya jumlah anggota legislatif yang bertugas mengawasi pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang ada untuk dapat digunakan dengan baik. Kedudukan DPRD sebagai lembaga negara memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan (Wasistiono & Wiyoso, 2009). Ukuran legislatif atau DPRD merupakan pengukuran lembaga yang memiliki posisi dan peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan daerah. Banyaknya jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap

pemerintah daerah sehingga berdampak dengan adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah (Sumarjo, 2010).

2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Kusumawardani (2012) yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia pada tahun 2009. Hasil dari penelitian ini adalah *Size* dan Ukuran Legislatif berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia sedangkan Kemakmuran dan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Penelitian kedua dilakukan oleh Sudarsana dan Rahardjo (2013) yang dilakukan pada Kabupaten/Kota di Indonesia pada tahun 2010. Hasil penelitian ini menunjukkan Tingkat Kekayaan Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia sedangkan Temuan Audit BPK berpengaruh negatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia, kemudian Ukuran Daerah, Belanja Modal, dan Tingkat Ketergantungan Pada Pusat tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Saragih dan Setyaningrum (2015) dimana hasilnya menunjukkan bahwa Latar Belakang Profesi Kepala Daerah dan Ukuran Legislatif berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah sedangkan Latar Belakang Pendidikan, Motif *Reelection*, dan Kompetisi Politik tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Penelitian keempat dilakukan oleh Utomo (2015) yang dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia dengan tahun anggaran 2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah dan Tingkat Kekayaan Daerah berpengaruh positif

terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia sedangkan Tingkat Ketergantungan Pada Pusat, Belanja Modal, *Leverage*, dan Temuan Audit BPK berpengaruh negatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.

Penelitian kelima dilakukan oleh Ara dkk (2016). Hasil dari penelitian ini adalah Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Pada Pusat, Belanja Modal, dan Temuan Audit BPK berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Pulau Sumba. Penelitian keenam dilakukan oleh Juweny (2016). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Ukuran Daerah dan Tingkat Kekayaan Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemda Provinsi di Indonesia sementara itu Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat, Belanja Daerah, dan Temuan Audit BPK tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemda Provinsi di Indonesia. Penelitian ketujuh dilakukan oleh Anggraini dkk (2019). Hasil dari penelitian ini menunjukkan Tingkat Kekayaan Daerah dan Ketergantungan Pada Pusat berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sedangkan Ukuran Pemerintah, Rasio Belanja Modal, Ukuran Legislatif, dan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Hasil pengujian penelitian terdahulu mengenai Kinerja Pemerintah Daerah dapat dilihat dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3

Ringkasan Penelitian Terdahulu

Penulis	Variabel	Obyek	Hasil
Kusumawardani (2012)	X1 = <i>Size</i> X2 = Kemakmuran X3 = Ukuran Legislatif X4 = <i>Leverage</i> Y = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia	Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia	X1 dan X3 berpengaruh positif terhadap Y. X2 dan X4 tidak berpengaruh terhadap Y.
Sudarsana dan Rahardjo (2013)	X1 = Ukuran Daerah X2 = Tingkat Kekayaan Daerah X3 = Tingkat Ketergantungan Pada Pusat X4 = Belanja Modal X5 = Temuan Audit BPK Y = Kinerja Pemerintah Daerah	Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia	X2 dan X5 berpengaruh positif terhadap Y. X1, X3, dan X4 tidak berpengaruh terhadap Y.
Saragih dan Setyaningrum (2015)	X1 = Latar Belakang Profesi Kepala Daerah X2 = Latar Belakang Pendidikan Kepala Daerah X3 = Motif <i>Reelection</i> X4 = Kompetisi Politik X5 = Ukuran Legislatif Y = Kinerja Pemerintah Daerah	Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia	X1 dan X5 berpengaruh positif terhadap Y. X2, X3, dan X4 tidak berpengaruh terhadap Y.
Utomo (2015)	X1 = Ukuran Pemerintah Daerah X2 = Tingkat Kekayaan Daerah X3 = Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat X4 = Belanja Modal X5 = <i>Leverage</i>	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia	X1 dan X2 berpengaruh positif terhadap Y. X3, X4, X5, dan X6 berpengaruh negatif terhadap Y.

	X6 = Temuan Audit BPK Y = Kinerja Pemda Kabupaten/Kota		
Ara dkk (2016)	X1 = Tingkat Kekayaan Daerah X2 = Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat X3 = Belanja Modal X4 = Temuan Audit Y = Kinerja Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah Kabupaten di Pulau Sumba	X1, X2, X3, dan X4 berpengaruh positif terhadap Y.
Juweny (2016)	X1 = Ukuran Daerah X2 = Tingkat Kekayaan Daerah X3 = Tingkat Ketergantungan Pada Pusat X4 = Belanja Daerah X5 = Temuan Audit BPK Y = Kinerja Pemda Provinsi di Indonesia.	Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia	X1 dan X2 berpengaruh positif terhadap Y. X3, X4, dan X5 tidak berpengaruh terhadap Y.
Anggraini dkk (2019)	X1 = Ukuran Daerah X2 = Tingkat Kekayaan X3 = Tingkat Ketergantungan X4 = Rasio Belanja Modal X5 = Ukuran Legislatif X6 = <i>Leverage</i> Y = Kinerja Pemerintah Daerah	Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi	X2 dan X3 berpengaruh positif terhadap Y. X1, X4, X5, dan X6 tidak berpengaruh terhadap Y.

2.5. Pengembangan Hipotesis

2.5.1. Pengaruh Ukuran Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Ukuran daerah menggambarkan seberapa besar daerah tersebut dengan melihat total sumber daya ekonomi yang dimiliki atau total aset. Ukuran daerah yang besar dalam pemerintah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai. Menurut Sumarjo (2010) pelayanan yang baik dapat diberikan Pemda jika didukung dengan aset yang baik pula. Pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar akan dituntut untuk memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan pemerintah daerah yang kecil ukurannya.

Hasil penelitian Kusumuwardani (2012) menunjukkan bahwa *size* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian Utomo (2015) menunjukkan bahwa ukuran daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemda. Penelitian Juweny (2016) menunjukkan bahwa ukuran daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemda. Hasil penelitian Sudarsana dan Rahardjo (2013) dan Anggraini dkk (2019) menunjukkan bahwa ukuran daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemda.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan bahwa tiga peneliti menyatakan ukuran daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemda. Sedangkan dua peneliti menyatakan ukuran daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemda. Dari uraian di atas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H1: Ukuran daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

2.5.2. Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Tingkat Kekayaan Daerah dinyatakan dengan jumlah PAD. Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Pemda yang memiliki PAD yang tinggi dapat memanfaatkan kekayaan asli daerahnya dalam meningkatkan kemampuan untuk membiayai pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan PAD seharusnya didukung dengan peningkatan kualitas layanan publik yang mencerminkan baiknya kinerja suatu Pemda (Sumarjo, 2010).

Hasil penelitian Sudarsana dan Rahardjo (2013) menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemda. Penelitian Utomo (2015) menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemda. Penelitian Ara dkk (2016) menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemda.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dinyatakan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemda. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis yang akan diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Tingkat Kekayaan Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

2.5.3. Pengaruh Tingkat Ketergantungan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Tingkat ketergantungan berbeda-beda yang diwujudkan dalam bentuk penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU). Semakin besarnya DAU pada suatu daerah maka akan semakin tinggi pengawasan pelaksanaan alokasi DAU oleh pemerintah. Dengan pengawasan yang tinggi maka dapat memotivasi Pemda untuk berkinerja lebih baik. Maka semakin tinggi DAU dari Pemerintah Pusat dapat memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat dan membuat kualitas Pemda juga semakin meningkat (Utomo, 2015).

Hal ini didukung dengan hasil penelitian Anggraini dkk (2019) dan Ara dkk (2016) yang mengungkapkan bahwa tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian Utomo (2015) menunjukkan tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh negatif terhadap kinerja pemda.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan bahwa dua peneliti menyatakan tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah. Sedangkan satu peneliti menyatakan tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh negatif terhadap kinerja pemda. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Tingkat Ketergantungan berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

2.5.4. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal merupakan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah berupa infrastruktur maupun sarana yang dibangun sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Semakin baik manfaat yang diberikan belanja modal maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakat (Sudarsana & Rahardjo, 2013).

Hal ini dipertegas oleh penelitian Ara dkk (2016) yang membuktikan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah di Pulau Sumba. Dari uraian di atas, maka hipotesis ini adalah:

H4: Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

2.5.5. Pengaruh Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Ukuran Legislatif adalah banyaknya jumlah anggota legislatif yang bertugas mengawasi pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang ada untuk dapat digunakan dengan baik (Wasistiono & Wiyoso, 2009). Banyaknya jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga berdampak dengan adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah (Sumarjo, 2010).

Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian Kusumawardani (2012) yang membuktikan bahwa ukuran legislatif berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian Saragih dan Setyaningrum (2015) menunjukkan bahwa ukuran legislatif berpengaruh positif terhadap kinerja pemda. Penelitian Anggraini dkk (2019) menunjukkan bahwa ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja pemda.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan bahwa dua peneliti menyatakan ukuran legislatif berpengaruh positif terhadap kinerja pemda. Sedangkan satu peneliti menyatakan ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja pemda. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan untuk diuji pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H5: Ukuran Legislatif berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Analisis data mengenai pengaruh ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, belanja modal, dan ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi Banten tahun 2014-2018 memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Ukuran daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi Banten.
2. Tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi Banten.
3. Tingkat ketergantungan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi Banten.
4. Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi Banten.
5. Ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi Banten.

5.2. Keterbatasan dan Saran

Keterbatasan penelitian ini adalah data penelitian yang digunakan hanya sampai dengan tahun 2018 dikarenakan Kementrian Dalam Negeri tidak mengeluarkan EKPPD tahun 2019 sehingga kurang mencerminkan kondisi yang terjadi saat ini atau relevansi datanya kurang.

Saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan skor kinerja yang terbaru agar lebih mencerminkan kondisi saat ini sehingga data yang dihasilkan dapat lebih relevan.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, L., Rahayu, S., & Junaidi. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 4(1), 45-56.
- Ara, S. C., Herwanti, T., & Pituringsih, E. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemda dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemda Kabupaten di Pulau Sumba. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 4(1), 1-17.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Damanpour, F. (1991). Organizational innovation: A meta-analysis of effects of determinants and moderators. *Academy of management journal*, 34(3), 555-590.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). (2013). *Laporan Evaluasi Belanja Modal Daerah*.
- Djanegara, M. S. (2017). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Teori, Praktik, dan Permasalahan*. Yogyakarta: Hak Cipta.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate IBM SPSS 23*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah (Revisi)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. & Abdullah, S. (2010). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), 53-64.
- Hartono, J. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman (Edisi 6)*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Julitawati, E., Darwanis, & Jalaluddin. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Universtas Syiah Kuala*, 1, 15-29.
- Juweny, S. (2016). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia*. Tesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
- Kusumawardani, M. (2012). Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 1(1), 27-35.

- Kompasiana. (11 Oktober 2018). #2019GantiGubernur: Kinerja Pemprov Banten Rendah. <https://kompasiana.com>.
- Mahsun, M. (2013). *Pengukuran Kinerja Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Murhadi, W. R. (2013). *Analisis Laporan Keuangan: Proyeksi dan Valuasi Saham*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD).
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Saragih, H. A., & Rahardjo, S. N. (2015). Pengaruh Pengawasan Fungsional dan Legislatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia tahun 2011-2012. *Symposium Nasional Akuntansi XVIII*, 1-26.
- Sudarmadji, A. M., & Sularto, L. (2007). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Tipe Kepemilikan Perusahaan Terhadap Luas Voluntary Disclosure Laporan Keuangan Tahunan. *Proceeding PESAT Auditorium Kampus Gunadarma*, 2.
- Sudarsana, H. S., & Rahardjo, S. N. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(4), 1-13.

- Sumarjo, H. (2010). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.
- Sutaryo & Jakawinarna. (2013). *Karakteristik DPRD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Dukungan Empiris dari Perspektif Teori Keagenan. Simposium Nasional XVI*.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
- Utomo, K. P. (2015). *Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2012)*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wasistiono, S., & Wiyoso, Y. (2009). *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Bandung: Fokusmedia.
- Winarna, J., & Murni, S. (2007). Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Di Karesidenan Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006). *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 9(2).





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**

GEDUNG RADIUS PRABERO, LANTAI 10, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10110 TELEPON (021) 3866100,
FAXSIMILE (021) 3866102; LAMAN WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-160/PK.1/2020 29 Mei 2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Tanggapan atas Permohonan Informasi Publik a.n. Sdr. Leonarda Archita
Evelindasari

Yth. Sdr. Leonarda Archita Evelindasari
Kost Putri Floraya Jl. Garuni III Blok G/80B, Kledokan, Depok, Sleman, Yogyakarta

Sehubungan dengan permohonan informasi publik yang Saudara sampaikan kepada PPID
Tingkat I DJPK melalui email ppid.djpk@kemenkeu.go.id pada tanggal 28 Mei 2020 dengan
nomor pendaftaran REG-84/PPID.PK/2020, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Permintaan data yang Saudara ajukan adalah: "Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2014- 2018 seluruh Kabupaten/Kota di Banten (4 kabupaten dan 4
kota)."
2. Berkenaan dengan hal tersebut, dapat kami informasikan bahwa data sebagaimana dimaksud
telah kami sampaikan kepada Saudara melalui email architaevelin@gmail.com pada tanggal 2
Juni 2020, sesuai dengan data yang tersedia pada database kami.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal



Ditandatangani secara elektronik
Rukijo





Realisasi APBD tahun 2014

No	Kab/Kota	Pendapatan daerah	PAD	DAU	Belanja Daerah	Belanja Modal
1	Kab. Lebak	1,796,231,788,248	244,448,053,657	1,000,878,505,000	1,725,537,969,208	395,207,514,996
2	Kab. Pandeglang	1,747,029,494,546	140,046,902,014	1,077,077,628,000	1,640,017,295,719	291,282,477,744
3	Kab. Serang	2,012,068,317,407	464,326,280,197	950,704,648,000	1,909,367,171,714	356,764,744,910
4	Kab. Tangerang	3,698,374,252,841	1,576,315,878,393	1,213,857,913,000	3,512,788,491,741	1,251,544,934,067
5	Kota Cilegon	1,304,405,754,202	467,950,299,677	490,917,599,000	1,222,804,814,553	317,544,837,119
6	Kota Tangerang	3,016,402,369,860	1,258,738,853,834	890,213,131,000	2,656,087,931,653	448,348,236,574
7	Kota Serang	964,185,766,967	37,501,061,434	564,282,698,000	949,970,142,088	151,309,166,795
8	Kota Tangsel	6,337,396,698,105	1,023,817,429,319	566,429,457,000	6,128,937,574,158	4,750,206,918,181

Indeks EKPPD tahun 2014

No	Kab/Kota	Kinerja Pemda
1	Kab. Lebak	2.1869
2	Kab. Pandeglang	3.0228
3	Kab. Serang	2.7143
4	Kab. Tangerang	2.8562
5	Kota Cilegon	2.4881
6	Kota Tangerang	2.8789
7	Kota Serang	1.4354
8	Kota Tangsel	2.3541

Analisis Data tahun 2014

No	Kab/Kota	X1_Ukuran_Daerah	X2_Tingkat_Kekayaan_Daerah	X3_Tingkat_Ketertinggalan	X4_Belanja_Modal	X5_Ukuran_Legislatif	Y_Kinerja_Pemda
1	Kab. Lebak	29.32	0.136089371	0.557210106	0.229034378	50	2.1869
2	Kab. Pandeglang	28.29	0.080162872	0.61651943	0.177609394	50	3.0228
3	Kab. Serang	29.08	0.230770633	0.472501177	0.186849732	50	2.7143
4	Kab. Tangerang	30.45	0.426218595	0.32821392	0.356282462	50	2.8562
5	Kota Cilegon	28.82	0.358745964	0.376353445	0.259685629	35	2.4881
6	Kota Tangerang	29.41	0.417298059	0.295124132	0.168800224	50	2.8789
7	Kota Serang	28.32	0.038894021	0.585242717	0.159277813	45	1.4354
8	Kota Tangsel	30.05	0.161551735	0.089378886	0.775045734	50	2.3541

Realisasi APBD tahun 2015

No	Kab/Kota	Pendapatan daerah	PAD	DAU	Belanja Daerah	Belanja Modal
1	Kab. Lebak	2,237,617,202,823	301,542,032,432	1,029,228,685,000	2,092,695,058,672	464,213,655,293
2	Kab. Pandeglang	2,053,864,858,795	163,921,272,579	1,107,070,138,000	2,037,028,432,385	318,350,393,310
3	Kab. Serang	2,304,837,741,509	579,605,446,965	970,418,459,000	2,342,220,890,626	414,261,378,033
4	Kab. Tangerang	4,229,034,302,499	1,851,195,176,763	1,212,934,842,000	4,179,069,902,022	1,585,911,127,269
5	Kota Cilegon	1,409,261,799,808	579,585,574,661	514,376,024,000	1,464,005,370,994	373,027,108,025
6	Kota Tangerang	3,379,623,327,247	1,471,944,383,908	887,033,912,000	3,101,034,565,203	605,278,286,415
7	Kota Serang	1,105,658,800,589	111,062,806,774	584,907,276,000	1,061,917,792,736	183,910,387,759
8	Kota Tangsel	2,602,412,225,495	1,228,393,889,612	609,519,143,000	2,621,240,244,577	982,985,799,542

Indeks EKPPD tahun 2015

Analisis Data tahun 2015

No	Tahun	Kab/Kota	X1_Ukuran_Daerah	X2_Tingkat_Kekayaan_Daerah	X3_Tingkat_Ketergantungan	X4_Belanja_Modal	X5_Ukuran_Legislatif	Y_Kinerja_Pemda
1	2015	Kab. Lebak	29.06	0.13476033	0.45996638	0.221825752	50	2.7042
2	2015	Kab. Pandeglang	28.43	0.079811129	0.539018005	0.156281762	50	3.06
3	2015	Kab. Serang	28.91	0.251473428	0.421035477	0.176866913	50	2.7745
4	2015	Kab. Tangerang	29.85	0.437734727	0.286811304	0.379489017	50	2.5141
5	2015	Kota Cilegon	28.62	0.411268917	0.364996783	0.254799002	35	2.8655
6	2015	Kota Tangerang	29.49	0.435535041	0.262465318	0.195185921	50	2.922
7	2015	Kota Serang	28.51	0.100449439	0.529012455	0.173187029	45	2.511
8	2015	Kota Tangsel	30.44	0.472021257	0.234213142	0.3750079	50	2.7107

Realisasi APBD tahun 2016

No	Kab/Kota	Pendapatan Daerah	PAD	DAU	Belanja Daerah	Belanja Modal
1	Kab. Lebak	2,496,433,196,983	304,485,931,938	1,100,336,786,000	2,434,575,832,324	541,448,512,783
2	Kab. Pandeglang	2,209,655,129,381	198,750,877,114	1,184,990,939,000	2,215,360,536,783	369,304,933,837
3	Kab. Serang	2,468,077,495,354	590,865,666,125	1,090,140,139,000	2,543,616,888,641	417,285,118,289
4	Kab. Tangerang	4,799,673,684,723	2,054,715,995,931	1,196,642,873,000	4,535,329,446,273	1,410,376,720,957
5	Kota Cilegon	1,618,573,368,773	567,671,194,175	605,983,274,000	1,612,248,915,237	461,651,193,903
6	Kota Tangerang	3,388,541,592,672	1,590,080,330,000	881,600,221,000	3,697,410,215,147	933,923,683,568
7	Kota Serang	1,132,266,273,590	126,900,900,019	647,985,703,000	1,129,841,327,429	169,833,426,482
8	Kota Tangsel	2,664,158,764,561	1,346,240,155,744	581,505,815,000	2,888,885,248,322	1,049,322,168,298

Indeks EKPPD tahun 2016

Analisis Data tahun 2016

No	Tahun	Kab/Kota	X1_Ukuran_Daerah	X2_Tingkat_Kekayaan_Daerah	X3_Tingkat_Ketergantungan	X4_Belanja_Modal	X5_Ukuran_Legislatif	Y_Kinerja_Pemda
1	2016	Kab. Lebak	29.16	0.121968388	0.440763561	0.222399527	50	2.9504
2	2016	Kab. Pandeglang	28.55	0.08994656	0.536278681	0.166701956	50	3.157
3	2016	Kab. Serang	28.94	0.239403206	0.441696074	0.164051874	50	3.0253
4	2016	Kab. Tangerang	29.95	0.428094935	0.249317548	0.310975584	50	3.014
5	2016	Kota Cilegon	28.77	0.350723177	0.374393454	0.2863399	35	3.0586
6	2016	Kota Tangerang	29.57	0.469252121	0.26017099	0.252588604	50	2.5518
7	2016	Kota Serang	28.58	0.112076905	0.572290916	0.150316175	45	2.7345
8	2016	Kota Tangsel	30.54	0.505315289	0.218269956	0.363227362	50	3.0338

Realisasi APBD tahun 2017

No	Kab/Kota	Pendapatan Daerah	PAD	DAU	Belanja Daerah	Belanja Modal
1	Kab. Lebak	2,421,101,201,526	467,474,538,181	1,081,007,407,000	2,481,358,755,906	374,004,042,572
2	Kab. Pandeglang	2,465,844,714,731	387,100,584,855	1,164,174,459,000	2,537,861,072,039	541,393,604,340
3	Kab. Serang	2,810,704,635,828	815,399,914,407	1,070,989,882,000	2,741,996,854,461	463,747,394,225
4	Kab. Tangerang	5,313,000,578,276	2,786,647,279,878	1,175,621,706,000	4,981,819,063,633	1,530,660,350,264
5	Kota Cilegon	1,708,838,034,694	652,084,326,149	595,338,097,000	1,758,155,073,262	500,709,558,135
6	Kota Tangerang	3,930,164,161,844	1,991,898,969,395	866,113,340,000	3,896,051,044,376	1,013,676,203,923
7	Kota Serang	1,231,344,645,550	232,458,208,409	636,602,678,000	1,330,488,751,791	333,514,135,271
8	Kota Tangsel	3,000,278,801,133	1,622,004,639,363	572,637,313,000	2,967,633,308,554	1,007,512,392,825

Indeks EKPPD tahun 2017

Analisis Data tahun 2017

No	Tahun	Kab/Kota	X1_Ukuran_Daerah	X2_Tingkat_Kekayaan_Daerah	X3_Tingkat_Ketertarikan	X4_Belanja_Modal	X5_Ukuran_Legislatif	Y_Kinerja_Pemda
1	2017	Kab. Lebak	29.11	0.193083436	0.446494102	0.150725501	50	3.0533
2	2017	Kab. Pandeglang	28.67	0.156984981	0.47211994	0.21332673	50	3.0853
3	2017	Kab. Serang	28.98	0.290105159	0.38103964	0.169127617	50	3.0698
4	2017	Kab. Tangerang	30.11	0.524495949	0.221272648	0.307249286	50	3.1191
5	2017	Kota Cilegon	28.84	0.381595162	0.348387667	0.284792602	35	3.2237
6	2017	Kota Tangerang	29.66	0.506823351	0.220375868	0.260180422	50	3.402
7	2017	Kota Serang	25.72	0.188784033	0.516997967	0.250670391	45	2.9606
8	2017	Kota Tangsel	30.58	0.540617971	0.190861367	0.339500298	50	3.0701

Realisasi APBD tahun 2018

No	Kab/Kota	Pendapatan Daerah	PAD	DAU	Belanja Daerah	Belanja Modal
1	Kab. Lebak	2,504,432,439,568	349,363,426,874	1,086,661,291,000	2,446,805,614,645	313,774,637,682
2	Kab. Pandeglang	2,362,130,982,589	196,996,806,997	1,171,648,878,055	2,456,844,232,071	343,009,276,715
3	Kab. Serang	2,918,628,102,041	697,085,199,649	1,078,411,345,000	2,998,103,708,874	589,719,504,503
4	Kab. Tangerang	5,483,110,413,991	2,872,568,512,687	1,176,554,273,724	5,878,835,077,360	1,763,560,497,024
5	Kota Cilegon	1,630,020,299,070	578,335,630,416	597,861,841,963	1,590,087,084,842	304,636,619,602
6	Kota Tangerang	3,971,571,451,402	1,864,385,584,947	866,113,340,000	4,288,007,523,239	1,024,749,198,501
7	Kota Serang	1,242,437,572,372	164,218,548,654	636,602,678,000	1,227,871,712,658	204,289,084,471
8	Kota Tangsel	3,211,105,498,451	1,621,710,653,274	571,874,988,075	3,271,441,999,424	1,019,928,803,901

Indeks EKPPD tahun 2018

Analisis Data tahun 2018

No	Tahun	Kab/Kota	X1_Ukuran_Daerah	X2_Tingkat_Kekayaan_Daerah	X3_Tingkat_Ketergantungan	X4_Belanja_Modal	X5_Ukuran_Legislatif	Y_Kinerja_Pemda
1	2018	Kab. Lebak	29.05	0.139498044	0.433895231	0.128238482	50	3.0541
2	2018	Kab. Pandeglang	28.70	0.083397918	0.496013509	0.139613766	50	2.9202
3	2018	Kab. Serang	28.98	0.238840022	0.369492552	0.1966975	50	3.0948
4	2018	Kab. Tangerang	30.30	0.523893975	0.214577892	0.299984686	50	2.8858
5	2018	Kota Cilegon	29.14	0.354802717	0.366781838	0.191584865	35	2.6284
6	2018	Kota Tangerang	29.69	0.469432719	0.218078247	0.238980271	50	3.3314
7	2018	Kota Serang	28.56	0.132174487	0.512382024	0.16637657	45	3.0233
8	2018	Kota Tangsel	30.64	0.505031882	0.178092868	0.31176735	50	3.1352

Jumlah Anggota DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2014-2018

No	Pemerintah Daerah	Jumlah
1	Kabupaten Lebak	50
2	Kabupaten Pandeglang	50
3	Kabupaten Serang	50
4	Kabupaten Tangerang	50
5	Kota Cilegon	35
6	Kota Tangerang	50
7	Kota Serang	45
8	Kota Tangerang Selatan	50

Indeks EKPPD tahun 2014-2018

No	Pemerintah Daerah	Tahun	Skor Kinerja Pemda	Prestasi
1	Kab. Lebak	2014	2,1869	Tinggi
2	Kab. Pandeglang	2014	3,0228	Sangat Tinggi
3	Kab. Serang	2014	2,7143	Tinggi
4	Kab. Tangerang	2014	2,8562	Tinggi
5	Kota Cilegon	2014	2,4881	Tinggi
6	Kota Tangerang	2014	2,8789	Tinggi
7	Kota Serang	2014	1,4354	Sedang
8	Kota Tangerang Selatan	2014	2,3541	Tinggi
9	Kab. Lebak	2015	2,7042	Tinggi
10	Kab. Pandeglang	2015	3,06	Sangat Tinggi
11	Kab. Serang	2015	2,7745	Tinggi
12	Kab. Tangerang	2015	2,5141	Tinggi
13	Kota Cilegon	2015	2,8655	Tinggi
14	Kota Tangerang	2015	2,922	Tinggi
15	Kota Serang	2015	2,511	Tinggi
16	Kota Tangerang Selatan	2015	2,7107	Tinggi
17	Kab. Lebak	2016	2,9504	Tinggi
18	Kab. Pandeglang	2016	3,157	Sangat Tinggi
19	Kab. Serang	2016	3,0253	Sangat Tinggi
20	Kab. Tangerang	2016	3,014	Sangat Tinggi
21	Kota Cilegon	2016	3,0586	Sangat Tinggi

22	Kota Tangerang	2016	2,5518	Tinggi
23	Kota Serang	2016	2,7345	Tinggi
24	Kota Tangerang Selatan	2016	3,0338	Sangat Tinggi
25	Kab. Lebak	2017	3,0533	Sangat Tinggi
26	Kab. Pandeglang	2017	3,0853	Sangat Tinggi
27	Kab. Serang	2017	3,0698	Sangat Tinggi
28	Kab. Tangerang	2017	3,1191	Sangat Tinggi
29	Kota Cilegon	2017	3,2237	Sangat Tinggi
30	Kota Tangerang	2017	3,402	Sangat Tinggi
31	Kota Serang	2017	2,9606	Tinggi
32	Kota Tangerang Selatan	2017	3,0701	Sangat Tinggi
33	Kab. Lebak	2018	3,0541	Sangat Tinggi
34	Kab. Pandeglang	2018	2,9202	Tinggi
35	Kab. Serang	2018	3,0948	Sangat Tinggi
36	Kab. Tangerang	2018	2,8858	Tinggi
37	Kota Cilegon	2018	2,6284	Tinggi
38	Kota Tangerang	2018	3,3314	Sangat Tinggi
39	Kota Serang	2018	3,0233	Sangat Tinggi
40	Kota Tangerang Selatan	2018	3,1352	Sangat Tinggi



Hasil Olah Data

1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ukuran Daerah	40	25.7200	30.6400	29.196000	.8914517
Tingkat Kekayaan Daerah	40	.0389	.5406	.292978	.1625836
Tingkat Ketergantungan	40	.0894	.6165	.377453	.1345308
Belanja Modal	40	.1282	.7750	.245266	.1117267
Ukuran Legislatif	40	35.0000	50.0000	47.500000	5.0636968
Kinerja Pemda	40	1.4354	3.4020	2.864530	.3488447
Valid N (listwise)	40				

2. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.22501434
	Absolute	.142
Most Extreme Differences	Positive	.080
	Negative	-.142
Kolmogorov-Smirnov Z		.899
Asymp. Sig. (2-tailed)		.394

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

3. Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-1.934	1.273		-1.520	.138		
Ukuran Daerah	.135	.046	.345	2.959	.006	.902	1.108
Tingkat Kekayaan Daerah	.818	.282	.381	2.900	.006	.708	1.413
Tingkat Ketergantungan	.808	.296	.311	2.727	.010	.938	1.066
Belanja Modal	.889	.406	.285	2.190	.036	.724	1.382
Ukuran Legislatif	.002	.008	.030	.251	.803	.843	1.186

a. Dependent Variable: Kinerja Pemda

4. Uji Heterokedastisitas

C					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.342	.738		1.820	.078
Ukuran Daerah	-.039	.026	-.244	-1.486	.147
Tingkat Kekayaan Daerah	-.290	.164	-.330	-1.776	.085
1 Tingkat Ketergantungan	.052	.172	.049	.302	.764
Belanja Modal	.111	.235	.087	.472	.640
Ukuran Legislatif	.000	.005	.010	.058	.954

a. Dependent Variable: ABS_RES

5. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.764 ^a	.584	.523	.2409922	1.850

a. Predictors: (Constant), Ukuran Legislatif, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan, Ukuran Daerah, Belanja Modal

b. Dependent Variable: Kinerja Pemda

6. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.764 ^a	.584	.523	.2409922

a. Predictors: (Constant), Ukuran Legislatif, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan, Ukuran Daerah, Belanja Modal

7. Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2.771	5	.554	9.544	.000 ^b
Residual	1.975	34	.058		
Total	4.746	39			

a. Dependent Variable: Kinerja Pemda

b. Predictors: (Constant), Ukuran Legislatif, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan, Ukuran Daerah, Belanja Modal

8. Uji Regresi Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.934	1.273		-1.520	.138
Ukuran Daerah	.135	.046	.345	2.959	.006
Tingkat Kekayaan Daerah	.818	.282	.381	2.900	.006
Tingkat Ketergantungan	.808	.296	.311	2.727	.010
Belanja Modal	.889	.406	.285	2.190	.036
Ukuran Legislatif	.002	.008	.030	.251	.803

a. Dependent Variable: Kinerja Pemda

